



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110 - Tromol Pos Nomor 1020  
Telepon : (021) 3843348 – 3810350 – 3454546; www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/BUA/RA1.8/I/2026 Jakarta, 30 Januari 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran TA. 2026

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
di  
Jakarta

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. DIPA Induk Badan Urusan Administrasi Nomor SP-DIPA-005.01.1.663157/2025.
- d. DIPA Petikan Badan Urusan Administrasi Revisi Nomor SP-DIPA-005.01.1.663157/2025 tanggal 9 Januari 2026, DS : 0473-0571-3402-8912.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tema Revisi:
  - Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (Pagu Anggaran Unit Organisasi tetap dan Pagu Anggaran Antar-Satker berubah).
- b. Tata Cara Revisi Anggaran:
  - Pergeseran anggaran antar satker antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
  - Pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) Program yang sama antar Kegiatan antar KRO antar RO dan/atau dalam RO yang sama.




3. Alasan / Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

- a. Pergeseran belanja pegawai operasional untuk pemenuhan belanja pegawai operasional (rincian terlampir);
- b. Pergeseran belanja barang operasional untuk sewa rumah dinas hakim, belanja sewa dan belanja barang operasional lainnya (rincian terlampir);
- c. Pemutakhiran Data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) pada Badan Urusan Administrasi;
- d. Usul revisi tersebut di atas tidak menyebabkan penurunan volume output unit Badan Urusan Administrasi.

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa :

- a. Matrik perubahan (Semula-Menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
- b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
- c. Surat Persetujuan Eselon I;
- d. Data dukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI  <b>Sobandi</b>
---	--

Tembusan :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
3. Kepala Biro Keuangan MA RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI.

